



PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

Rencana Strategis (RENSTRA)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa karena atas berkat dan rahmat nya lah kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas ini sebagai panduan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029 dan guna menunjang visi serta misi daerah Kabupaten Gunung Mas.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Periode 2025-2029 ini dapat dijadikan bahan acuan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas guna tercapainya keberhasilan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas 5 (Lima) tahun kedepan.

Kuala Kurun, Juni 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GUNUNG MAS,



SALAMPAR HARIS, S.Sos.,M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680817 198911 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	
SATPOL PP	5
2.1 Gambaran Pelayanan	5
2.1.1 Struktur Organisasi	5
2.1.2 Tugas pokok dan Fungsi Organisasi	8
2.1.3 Sumber Daya Manusia	9
2.1.4 Pelayanan Dasar Organisasi	13
2.2 Permasalahan & Isu Strategis	14
2.2.1 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Gunung Mas.	14
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATPOL PP	19
3.1 Tujuan & Sasaran	19
3.2 Strategi dan arah kebijakan	20
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG SATPOL PP	21
4.1 Program	21
4.2 Kegiatan	21
4.3 Subkegiatan	22
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang	24
BAB V PENUTUP	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia	10
Tabel 2. Aset yang dikelola oleh Satpol PP.....	10
Tabel 3. Tujuan & Sasaran	19
Tabel 4. Strategi & Arah Kebijakan	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah, sebelumnya Polisi Pamong Praja adalah bagian tata pemerintahan yang berada pada bagian (Sub Bagian Pol. PP) di struktur organisasi di sekretariat Kabupaten Gunung Mas.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gunung Mas merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan memegang jabatan struktural eselon II B, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas pokok membantu Bupati Gunung Mas dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gunung Mas.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas bersama-sama dengan para pejabat struktural, fungsional dan staf Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Gunung Mas.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja mencakup :

- Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2005, Tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2008, Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 40 Tahun 2011, Tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 tahun 2017, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 2 Tahun 2008, Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008, Nomor : 93);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 5 Tahun 2023, Tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 dimaksudkan menjadi pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sebagai dasar perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas. Adapun Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Acuan dalam melaksanakan Rencana Pembangunan
2. Pedoman dalam menyusun Renja OPD
3. Acuan dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja OPD
4. Acuan Evaluasi dan Penilaian Kinerja
5. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.
6. Mensinergikan rencana pembangunan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran di Kabupaten Gunung Mas.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bagian ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Satpol PP. Bagian ini berisi tentang Gambaran pelayanan yaitu: Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, sumber daya manusia, dan pelayanan dasar organisasi. Kemudian Permasalahan dan Isu Strategis berisi tentang Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Gunung Mas, dan Isu Strategi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP. Bagian ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Satpol PP. Bagian ini berisi tentang Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang.

BAB V Penutup. Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan harapan Satpol PP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP

2.1 Gambaran Pelayanan

Dalam melaksanakan pelayanannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gunung Mas diarahkan untuk mendukung Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2025-2029, melalui serangkaian Program dan Kegiatan, Baik yang menjadi Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gunung Mas memberikan pelayanan dalam bentuk penegakkan Peraturan Daerah (Perda), ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Adapun gambaran organisasi dan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut.

2.1.1 Struktur Organisasi

Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas sebagaimana terdapat pada Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor : 50 Tahun 2019, mempunyai Tugas dan Program Kerja masing-masing yaitu :

a. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai Tugas Memimpin dan Menyelenggarakan Kewenangan Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Peraturan Daerah, dan Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk Pemerataan Pembangunan.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai Tugas Memimpin dan Merencanakan Operasional Sekretariat yang meliputi Urusan Perencanaan, Keuangan dan Aset Serta Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas. Sekretariat terdiri dari :

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Memimpin dan melaksanakan Kegiatan Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang Berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

- **Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai Tugas Memimpin dan melaksanakan Tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku agar Pelaksanaan Program Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana yang ditetapkan.

c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Operasional dan Pengendalian, sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- **Seksi Ketertiban Umum, Operasional dan Pengendalian**

Seksi Ketertiban Umum, Operasional dan Pengendalian mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan di seksi Ketertiban Umum, Operasional dan Pengendalian berdasarkan Rencana Operasional Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

- **Seksi Perlindungan Masyarakat**

Seksi Perlindungan Masyarakat Mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan di Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah, sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :

- **Seksi Penegakan**

Seksi Penegakan mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan di Seksi Penegakan berdasarkan Rencana Operasional Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

- **Seksi Penyuluhan**

Seksi Penyuluhan mempunyai Tugas memimpin dan melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan Seksi Penyuluhan berdasarkan Rencana Operasional Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

e. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran Mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas. Bidang Damkar terdiri dari:

- **Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana**

Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Mempunyai Memimpin dan Melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan di Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana, Data dan Informasi Berdasarkan Rencana Operasional Bidang Pemadam Kebakaran yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

- **Seksi Penyelamatan dan Evakuasi**

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan di Seksi Penyelamatan dan Evakuasi berdasarkan Rencana Operasional Bidang Pemadam Kebakaran yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mempunyai Tugas Melaksanakan Kegiatan Teknis Perasional dan Kegiatan Teknis Penunjang.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai Tugas Melaksanakan sebagian Tugas Satpol PP dan Damkar sesuai dengan Keahlian dan Fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas dalam Melaksanakan tugasnya, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Adapun Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

- Merumuskan Kebijakan Teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran) sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
- Menetapkan Kebijakan Teknis Ketertiban Umum d a n ketentraman serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
- Melaksanakan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengaturan serta Penyelenggaraan Kegiatan dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- Melaksanakan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengaturan serta Penyelenggaraan Kegiatan dibidang Trantibum dan Linmas;
- Melaksanakan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengaturan serta Penyelenggaraan Kegiatan dibidang Pemadam Kebakaran;
- Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi yang Terkait;
- Membina dan Mengoordinasikan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengendalikan Pengelolaan Kegiatan Ketatausahaan;

- Mengoordinasikan dan Membina Unit Pelaksanaan Teknis;
- Mengoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional;
- Mengevaluasi dan Melaporkan Pelaksanaan Tugas; dan
- Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai Bidang Tugas.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi yaitu:

- Perumusan Kebijakan Daerah dibidang Ketertiban Umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran)
- Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Ketertiban Umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketertiban Umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
- Pelaksanaan Administrasi Satpol PP dan Damkar; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Sumber Daya Manusia

Berikut adalah pembagian tugas dan kewenangan masing-masing unsur Pejabat Esselonning pada struktur rganisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas, keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas saat ini terdiri dari 29 orang PNS, 1 orang PPPK, 90 orang CPNS, dan 106 orang PTT sehingga secara keseluruhan berjumlah 226 orang.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia

a. Personil

No.	Pangkat/Golongan	Frekuensi	Keterangan
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Pembina TK. I (IV/b)	1	Sekretaris
3.	Pembina (IV/a)	4	- 3 Kepala Bidang - 1 Penelaah Teknisi Kebijakan
4.	Penata TK.I (III/d)	5	- 4 Kepala Seksi - 1 Pol PP Ahli Muda
5.	Penata (III/c)	5	- 2 Kasubbag - 1 Kepala Seksi - 2 Penelaah Teknisi Kebijakan
6.	Penata Muda TK.I (III/b)	1	Penelaah Teknisi Kebijakan
7.	Penata Muda (III/a)	47	- 46 Pol PP Ahli Pertama - 1 Penelaah Teknisi Kebijakan
8.	Penata TK.I (II/d)	8	Anggota dan Staff
9.	Pengatur (II/c)	1	Anggota
10.	Pengatur Muda (II/a)	46	Pol PP Pemula dan Anggota
11.	Golongan VII	1	PPPK Damkar
Jumlah		120	

b. Personil PTT

No.	Golongan	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1.	PTT	S1	9
		SMA	97
Jumlah			106

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas juga memiliki Aset yang Dikelola oleh Satpol PP untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan, yaitu meliputi:

Tabel 2. Aset yang Dikelola oleh Satpol PP

No	Jenis Kendaraan	Kuantitas	Kondisi
1	Truck Pemadam Kebakaran	4 Unit	Kurang baik
2	Mobil Patwal	1 Unit	Baik
3	Mobil Patroli	1 Unit	Rusak berat
4	Truk Dalmas	1 Unit	Kurang baik
5	Motor Operasional	8 Unit	Kurang baik
6	Motor R3	3 Unit	Baik
7	Mobil Operasional Ford Ranger	1 Unit	Rusak berat
8	Mobil Jabatan Kasat Innova	1 Unit	Baik
9	Mobil Jabatan Sekretaris Rush	1 Unit	Baik

10	AC Split	13 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
11	Rak Kayu	10 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
12	Filling Besi/Metal	6 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
13	Rak Besi	2 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
14	Brankas	1 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
15	White Board	1 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
16	laptop	10 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
17	Lemari Kayu	4 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
18	Sofa	6 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
19	Meja Kerja Pejabat III	6 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
20	Meja Kerja Penjabat IV	20 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
21	Kursi Pejabat Eselon III	6 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
22	Kursi Pejabat Eselon IV	20 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
23	Handy Talky	17 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
24	PC Unit	14 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
25	Dispenser	8 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
26	Printer	24 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET

27	Lemari Es	1 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
28	Papan Nama Instansi	2 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
29	Papan Visual/Papan Nama	1 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
30	Notebook	11 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
31	Faxcimile	1 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
32	Mesin Potong Rumput	1 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
33	Televisi	7 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
34	Megaphone	2 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
35	Pentung	22 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
36	Camera Electronic	2 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
37	Meubelair Lainnya	57 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
38	Kursi Lipat	22 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
39	Kursi Biasa	12 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
40	Kipas Angin	2 Unit	Sedang dalam Proses pendataan ASET
41	Alat Rumah Tangga Lainnya	Sedang dalam Proses	Sedang dalam Proses pendataan ASET
42	Peralatan Mini Komputer Lainnya	Sedang dalam Proses	Sedang dalam Proses pendataan ASET

2.1.4 Pelayanan Dasar Organisasi

Pelayanan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas merupakan bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan dari bahaya kebakaran maupun bencana lainnya.

1. Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati serta Mengamankan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Melaksanakan Patroli Wilayah terhadap Gangguan Ketertiban, Ketentraman, Keindahan dan Pelanggaran Perda dilingkup Wilayah Kabupaten Gunung Mas.
3. Melaksanakan Penertiban terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Kabupaten Gunung Mas.
4. Mengamankan aset dan fasilitas umum pemerintah Kabupaten Gunung Mas dari gangguan atau kerusakan.
5. Memberikan pelayanan perlindungan masyarakat (linmas) dalam situasi darurat.
6. Memberikan pelayanan penganggulangan dan penyelamatan dari bahaya kebakaran.
7. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, bukan hanya Peningkatan secara Kuantitas tapi juga segi Kualitas.
8. Penanggulangan Bencana Kebakaran yang Mencakup Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten, Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate), dengan rumus Waktu Minimal Kebakaran (WMK) sebagai berikut:

$$\bullet \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gunung Mas

Upaya pencapaian visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, secara prinsip manajemen pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan perangkat daerah. Hal ini mengingat kedudukan organisasi perangkat daerah merupakan operasional administrasi penyelenggaraan visi dan misi tersebut. Keberadaan perangkat daerah ini sebagai instrumen yang menjembatani implementasi program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Oleh karena itu keberhasilan implementasi visi, misi dan program kepala daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah menterjemahkannya kedalam operasional yang tertuang dalam tugas dan fungsi setiap organisasi.

Dengan demikian sinkronisasi program kepala daerah terpilih dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah akan memudahkan pencapaian visi yang ditetapkan tersebut. Berkenaan dengan perangkat daerah Satpol PP, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan organisasi ini sebagai penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penyelenggara penegakkan perda dan perkara.

Dengan demikian keberadaannya sebagai alat bagi kepala daerah dalam mewujudkan visi, misi dan program melalui penyelenggaraan tugas utama tersebut. Oleh karena itu, perlu dielaborasi lebih jauh relevansi visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan tugas utama yang diperankan pada Satpol PP. Hasil telaahan akan meletakkan posisi Satpol PP dalam fokus pencapaian misi yang relevan sehingga akan menjadi dasar penetapan strategi unit serta program dan kegiatan termasuk penentuan kebutuhan anggaran, personil serta sarana prasarana yang tepat.

Untuk memudahkan analisis relevansi yang menjadi titik perhatian perangkat daerah Satpol PP maka dapat dipaparkan Visi, Misi dan program Kepala Daerah sebagai berikut : **VISI** Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas terpilih yaitu : **“MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG BERKELANJUTAN, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI”**. Visi ini mengandung substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam Misi Pembangunan, seperti yang dijelaskan dibawah ini. Kelima rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun kedepan.

- **Bermartabat** adalah kondisi Kabupaten Gunung Mas memiliki dan mampu memelihara budaya dan adat istiadat yang luhur yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan golongan yang berbeda sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar yang negative dalam membangun harkat kemanusiaan yang sesungguhnya dan terhormat.
- **Maju** adalah bahwa tingkat perkembangan dan keberhasilan kegiatan pembangunan yang menempatkan Kabupaten Gunung Mas sejajar atau bahkan lebih maju dari Kabupaten/Kota atau daerah lain ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan mental spiritual.
- **Berdaya saing** adalah mampu bersaing dan berkembang dengan tersedianya infrastruktur dasar di Kabupaten Gunung Mas guna peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi yang bertumpu pada potensi unggulan.
- **Sejahtera** adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan ekonomi berasaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dan geografis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengembangkan kemampuan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan.

- **Mandiri** adalah mampu memanfaatkan potensi SDA yang melimpah dan keunggulan geografis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi yang harus dilakukan. Adapun **MISI** Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.
2. Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing.
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.
4. Peningkatan Birokrasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas dan melihat visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka Satpol PP Kabupaten Gunung Mas perlu merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima kedepan. Adapun acuan dalam perumusan tersebut dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2029 yang merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahun. Adapun Misi Kabupaten Gunung Mas yang ke 2 (dua) yaitu: “Peningkatan kualitas pembangunan SDM yang unggul, berbudaya dan berdaya saing.” Hal ini Selaras dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas dalam Mewujudkan masyarakat yang berbudaya taat dan tertib terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah khususnya di lingkup masyarakat kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas adalah “Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran”. Adapun sasaran yang ditetapkan berdasarkan tujuan tersebut yaitu: (1) Meningkatkan kualitas penanganan bencana kebakaran dan (2) Menurunkan pelanggaran peraturan daerah.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berangkat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Satpol PP, maka selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan stakeholders, aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas. Sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagai berikut :

- a) Dari aspek pelayanan Satpol PP teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
- b) Kemudian faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c) Dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan RT/RW berkenaan dengan adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan masih kurangnya Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masih sering terjadi;
2. Penegakan Perda dan Perkada masih belum optimal;
3. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah masih rendah;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana di lapangan seperti mobilitas untuk operasional dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. Peningkatan pembangunan manusia sesuai mutu pelayanan dasar melalui program Nasional melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan sains serta penegakan kesetaraan gender.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas, maka dirancang langkah-langkah atau strategi yang akan diambil agar permasalahan dapat diminimalisir bahkan dapat dicari solusi penyelesaiannya. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029. Tahap terakhir yang dilakukan adalah menentukan faktor kunci keberhasilan berdasarkan keempat strategi di atas.

Untuk menentukan faktor kunci keberhasilan tersebut dapat diketahui dengan melihat keterkaitan visi, misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dominan pada strategi agresif sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan. Berdasarkan Analisa tersebut diatas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis lima tahun ke depan yang akan dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesional sumber daya manusia.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional.
3. Meningkatkan alokasi dana baik APBD maupun APBN.
4. Memaksimalkan peran Satpol PP.
5. Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu.
6. Meningkatkan Penguasaan SDM terhadap IPTEK.
7. Melakukan penataan Struktur Organisasi dengan memanfaatkan potensi SDA lokal/potensi daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATPOL PP

3.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas. Adapun tujuan dan sasaran yang dirumuskan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Tujuan

1. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran.

b. Sasaran

1. Meningkatkan kualitas penanganan bencana kebakaran.
2. Menurunnya pelanggaran peraturan daerah.

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	1. Meningkatkan kualitas penanganan bencana kebakaran 2. Menurunnya pelanggaran peraturan daerah	Cakupan pelayanan Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat penyelesaian ketertiban, keamanan, dan keindahan (K3) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penegakkan Hukum Peraturan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

3.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah suatu rencana atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dan Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman atau dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Adapun strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 - 2029 terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Meningkatkan kualitas penanganan bencana kebakaran	1. Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat 2. Meningkatkan kapasitas sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dalam Penegakan peraturan Daerah 3. Penurunan gangguan ketentraman dan gangguan ketertiban umum masyarakat. 4. Sosialisasi dan Edukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran dan langkah pencegahan 5. Pelatihan keterampilan untuk tim pemadam kebakaran 6. Respon darurat cepat	1. Meningkatkan ketertiban dan keamanan 2. Peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dalam Pegegakan peraturan Daerah 3. Peningkatan penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. 4. Memberikan pelatihan dasar tentang cara menggunakan peralatan penyalaan api dengan aman dan melakukan simulasi kebakaran darurat untuk melatih respons masyarakat. 5. Peningkatan kapasitas teknis tentang teknik pemadaman api, termasuk penggunaan alat pemadaman api dan prosedur evakuasi. 6. Koordinasi dan komunikasi untuk memastikan informasi dapat disebarluaskan dengan cepat.
	Menurunnya pelanggaran peraturan daerah	1. Peningkatan Penyuluhan Perda dan Perkada untuk menjaga ketertiban dan keamanan 2. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum tegas	1. Pembentukan dan pembinaan Kader Siaga Trantib 2. Penyuluhan Perda dan Perkada kepada masyarakat 3. Penertiban keamanan dan ketertiban masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SATPOL PP

1.1 Program

Program Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) memiliki fokus pada penegakan Peraturan Daerah (Perda), penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ditegakkan, serta untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Berikut merupakan Program Kegiatan Satpol PP Kabupaten Gunung Mas, yang terdiri dari 3 Program yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
3. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

1.2 Kegiatan

Kegiatan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk melaksanakan tugas-tugas pokoknya, yaitu menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melindungi masyarakat. Satpol PP memiliki tugas yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Mereka berperan dalam menegakkan hukum, mengendalikan gangguan, dan membantu masyarakat dalam berbagai situasi. Kegiatan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Gunung Mas memiliki 10 kegiatan, yaitu :

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

8. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

1.3 Subkegiatan

Sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda), penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Beberapa sub kegiatan yang umum dilakukan Satpol PP meliputi penyiapan data penegakan dan pengawasan Perda, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pembinaan dan penyuluhan, patroli, serta pengamanan. Sub kegiatan Satpol PP Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 30 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
7. Penyediaan Komponen Instalasi
8. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Penyediaan Bahan/Material
13. Fasilitas Kunjungan Tamu
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
23. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
24. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
25. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
26. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
27. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
28. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
29. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
30. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
31. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
32. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
33. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
34. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
35. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
36. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
37. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Kabupaten Gunung Mas dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Kabupaten Gunung mas Tahun 2025- 2029. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas disusun sebagai arah atau panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Gunung Mas dan Wakil Bupati Gunung Mas dalam rangka meraih keberhasilan kinerja periode 2025 sampai dengan 2029 mendatang yaitu : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERKELANJUTAN, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI”**.

Program-program Strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas muaranya adalah mampu mewujudkan kondisi masyarakat secara umum yang kondusif, aman, tertib, tentram dan damai, patuh dan taat pada perundang-undangan yang berlaku. Berbagai landasan hukum telah dipergunakan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai acuan untuk menganalisis pembuatan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas dengan harapan mampu menjawab berbagai kendala dan ancaman yang akan muncul di masa mendatang dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas sangat berat dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya. Namun dengan segala daya dan upaya serta menggunakan potensi yang telah dimiliki dan peningkatan jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terkait, semoga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas akan memperoleh hasil yang maksimal.

Kuala Kurun, Juni 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GUNUNG MAS,

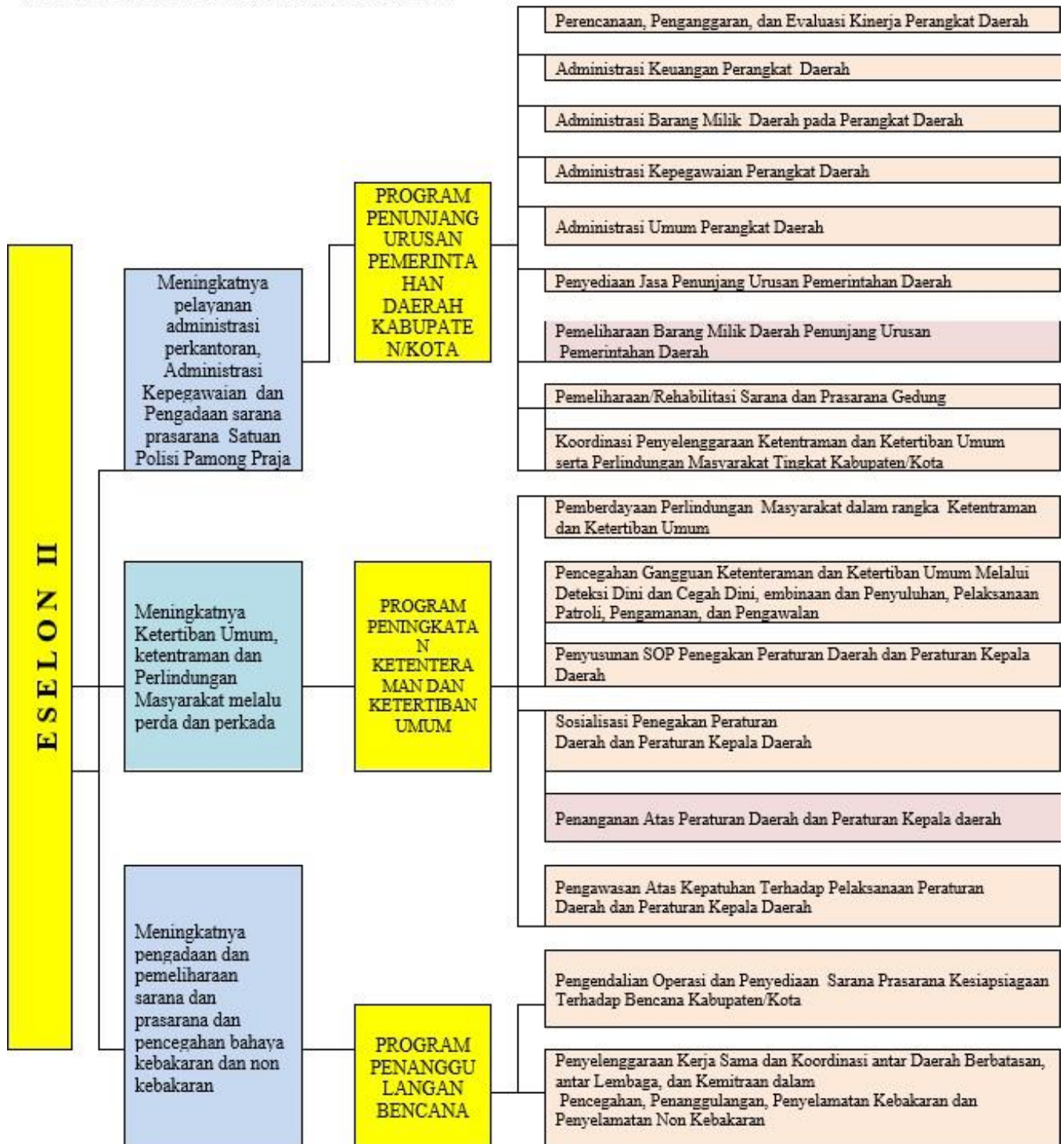


SALAMPAK HARIS, S.Sos., M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680817 198911 1 002

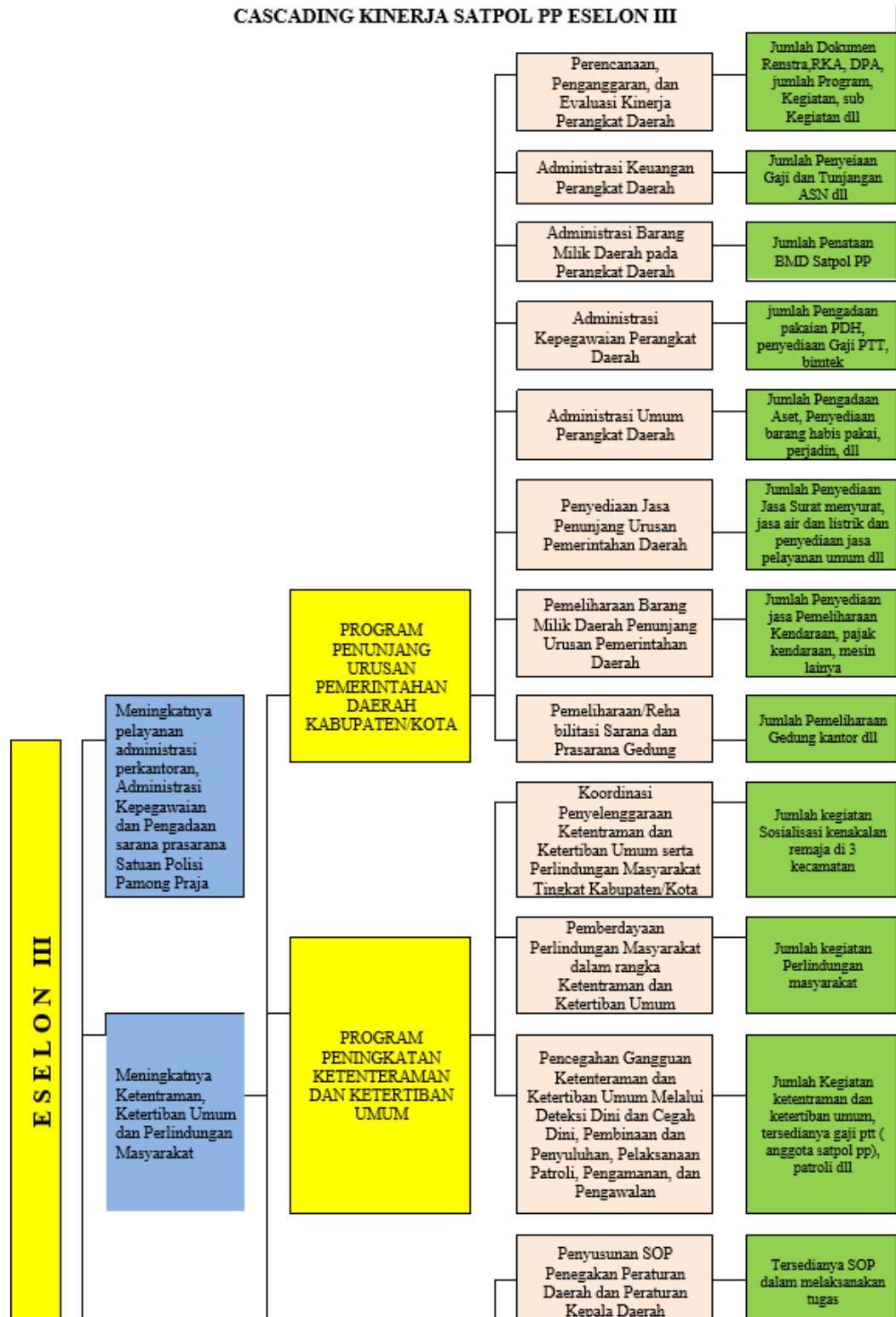
LAMPIRAN

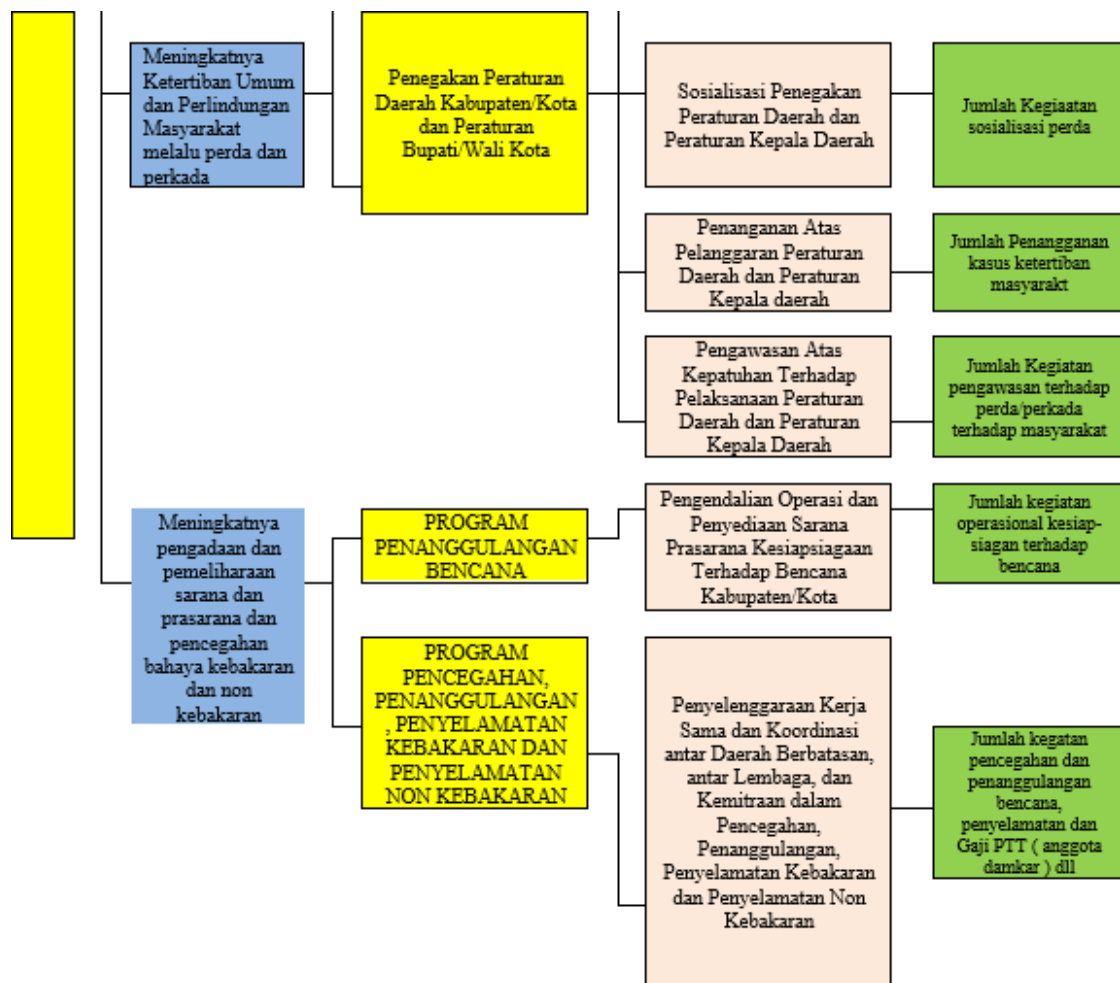
LAMPIRAN 1

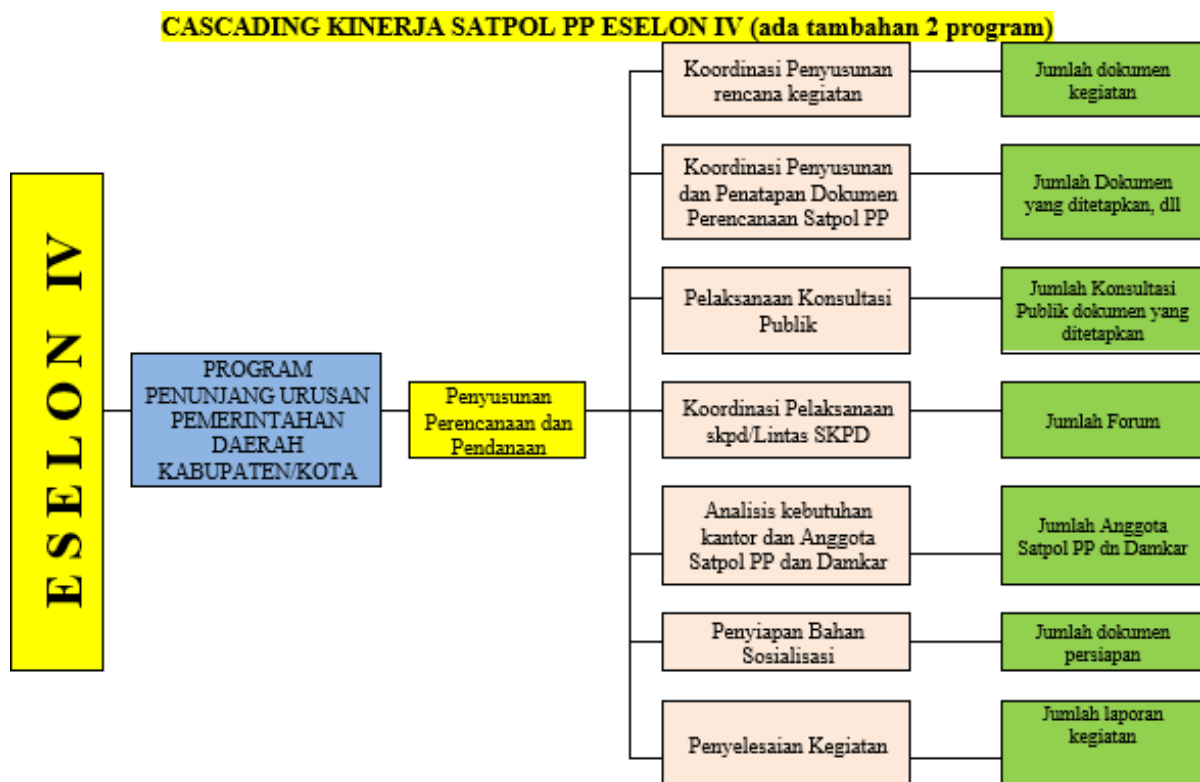
CASCADING KINERJA SATPOL PP



CASCADING KINERJA SATPOL PP ESELON III







LAMPIRAN 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. 3.674.968.100,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.674.968.100,00	Rp. 2.738.543.588,00
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 3.521.407.100,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.521.407.100,00	Rp. 2.171.761.565,00
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.133.874.320,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.133.874.320,00	Rp. 94.082.505,00
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kelentraman dan Kelortiban Umum	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kocamatan, Somua Kel/Desa		Rp. 35.923.880,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 35.923.880,00	Rp. 91.559.200,00
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.261.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.261.900,00	Rp. 0
1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PF dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 31.239.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 31.239.000,00	Rp. 0

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah		Tahun + 1				
							Tahun - 1	Tahun N					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Kelembagaan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 295.108.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 295.108.000,00	Rp. 1.986.119.860,00
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				Rp. 153.561.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 153.561.000,00	Rp. 566.782.023,00
1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 32.800.000,00	Rp. 70.000.000,00
1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.566.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.566.800,00	Rp. 15.256.325,00
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.644.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 46.644.500,00	Rp. 287.013.980,00
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.774.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 23.774.300,00	Rp. 160.044.560,00
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 36.775.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 36.775.400,00	Rp. 34.467.158,00
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				Rp. 304.095.878,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 304.095.878,00	Rp. 981.868.490,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahay Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 304.095.878,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 304.095.878,00	Rp. 981.868.490,00
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 180.716.942,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 180.716.942,00	Rp. 0
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 26.663.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 26.663.400,00	Rp. 0
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 96.715.536,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 96.715.536,00	Rp. 981.868.490,00

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1		Jumlah					Tahun + 1
									Tahun N					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 8.057.735.980,87	Rp. 386.099.375,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.443.835.355,87	Rp. 6.236.278.642,00	
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 153.848.059,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 153.848.059,00	Rp. 0,00	
1	05	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir		Rp. 131.293.770,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 131.293.770,00	Rp. 0	
1	05	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir		Rp. 22.554.289,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 22.554.289,00	Rp. 0	
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 6.981.546.464,67	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.981.546.464,67	Rp. 4.900.552.933,00	
1	05	01	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.973.246.464,67	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.973.246.464,67	Rp. 4.892.152.933,00	
1	05	01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.400.000,00	Rp. 8.400.000,00	
1	05	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 16.450.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 16.450.900,00	Rp. 9.523.660,00	
1	05	01	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.450.900,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.450.900,00	Rp. 9.523.660,00	
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 231.706.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 231.706.200,00	Rp. 455.160.362,00	
1	05	01	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 176.894.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 176.894.400,00	Rp. 418.342.950,00	
1	05	01	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 54.811.800,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 54.811.800,00	Rp. 36.817.412,00	
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 466.579.164,60	Rp. 386.099.375,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 852.678.539,60	Rp. 591.496.979,00	
1	05	01	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir		Rp. 21.650.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 21.650.400,00	Rp. 21.670.501,00	
1	05	01	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 194.727.219,60	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 194.727.219,60	Rp. 213.130.342,00	
1	05	01	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 22.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 22.200.000,00	Rp. 14.781.600,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.499.929,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.499.929,00	Rp. 61.999.716,00
								Jumlah	Rp. 12.036.799.953,87	Rp. 386.099.375,00			Rp. 12.422.899.333,87	Rp. 9.956.690.720,00
								Kab. Gunung Mas, Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
								SALAMPAK HARIS, S. Sos. M.Ec.Dev NIP. 196808171989111002						

LAMPIRAN 3

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERIA	INDIKATOR (OUTCOME) / (OUTPUT)	BASELINE AKMS	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR RUMBU	FILTER DISINI	
						2026		2027		2028		2029		2030				
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				15.710.334.653,87	-----	15.797.333.848,72	-----	16.152.032.228,70	-----	16.524.370.647,38	-----	16.915.058.696,91	-----	17.324.847.967,91	82.713.643.389,64	PD	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Ususan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Program Penunjang Ususan Pemerintah daerah/Kota	8.443.835.355,87	Laporan	8.490.594.823,04	Laporan	8.681.234.601,73	Laporan	8.881.355.374,02	Laporan	9.091.338.524,51	Laporan	9.311.588.010,67	44.456.111.333,96	PROGRAM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada PD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah padaPD	16.450.900,00	Laporan	16.542.000,23	Laporan	16.913.418,64	Laporan	17.303.308,62	Laporan	17.712.413,21	Laporan	18.141.519,43	86.612.660,14	KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	16.450.900,00	Laporan	16.542.000,23	Laporan	16.913.418,64	Laporan	17.303.308,62	Laporan	17.712.413,21	Laporan	18.141.519,43	86.612.660,14	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231.706.200,00	Laporan	232.989.320,52	Laporan	238.220.642,17	Laporan	243.712.130,55	Laporan	249.474.251,17	Laporan	255.518.088,99	1.219.914.433,41	KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	paket	-	paket	-	paket	-	paket	-	paket	-	-	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	176.894.400,00	dokume n	177.873.988,96	dokume n	181.867.803,13	dokume n	186.060.239,67	dokume n	190.459.288,43	dokume n	195.073.412,11	931.334.732,30	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.811.800,00	orang	55.115.331,57	orang	56.352.839,05	orang	57.651.890,87	orang	59.014.962,74	orang	60.444.676,88	288.579.701,11	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan gaji dan tunjangan perangkat daerah	6.981.646.464,67	Laporan	7.020.308.761,47	Laporan	7.177.936.128,75	Laporan	7.343.402.699,75	Laporan	7.517.023.816,03	Laporan	7.699.133.483,22	36.757.804.889,22	KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.973.246.464,67	orang	7.011.862.244,75	orang	7.169.299.961,94	orang	7.334.567.451,07	orang	7.507.979.674,32	orang	7.689.870.235,41	36.713.579.567,49	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.400.000,00	Laporan	8.446.516,72	Laporan	8.636.166,81	Laporan	8.835.248,68	Laporan	9.044.141,72	Laporan	9.263.247,80	44.225.321,72	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat Daerah	852.678.539,60	Laporan	857.400.421,60	Laporan	876.651.679,02	Laporan	896.860.349,69	Laporan	918.064.946,72	Laporan	940.306.262,70	4.489.283.659,73	KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Istrik/ Penerangan Bangunan Kantor	21.650.400,00	Laporan	21.770.293,52	Laporan	22.259.103,09	Laporan	22.772.222,37	Laporan	23.310.629,27	Laporan	23.875.359,55	113.987.607,79	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	194.727.219,60	Laporan	195.805.561,45	Laporan	200.201.994,17	Laporan	204.817.072,50	Laporan	209.659.591,73	Laporan	214.738.867,70	1.025.223.087,55	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	22.200.000,00	Laporan	22.322.937,05	Laporan	22.824.155,14	Laporan	23.350.300,07	Laporan	23.902.374,54	Laporan	24.481.440,62	116.881.207,42	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.555.500,00	dokume n	7.597.340,13	dokume n	7.767.923,61	dokume n	7.946.990,64	dokume n	8.134.882,47	dokume n	8.331.960,57	39.779.097,42	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	22.266.045,00	Laporan	22.389.347,78	Laporan	22.892.057,00	Laporan	23.419.767,21	Laporan	23.973.484,11	Laporan	24.554.272,90	117.228.929,01	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	10.017.000,00	Laporan	10.072.471,19	Laporan	10.298.628,92	Laporan	10.536.034,05	Laporan	10.785.139,00	Laporan	11.046.423,00	52.738.696,16	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordin dan konsultasi skpd	188.163.000,00	Laporan	189.204.991,14	Laporan	193.453.220,90	Laporan	197.912.725,77	Laporan	202.592.004,54	Laporan	207.500.059,04	990.663.001,40	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	386.099.375,00	dokume n	388.237.479,34	dokume n	396.954.596,19	dokume n	406.105.237,08	dokume n	415.706.841,06	dokume n	425.777.879,32	2.032.782.032,99	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset	128.686.617,60	Laporan	129.399.246,09	Laporan	132.304.654,27	Laporan	135.354.555,68	Laporan	138.554.762,72	Laporan	141.911.431,84	677.524.650,60	KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yg dipelihara dan di bayar Pajaknya	77.485.758,60	Unit	77.914.851,85	Unit	79.664.278,18	Unit	81.500.707,86	Unit	83.427.640,71	Unit	85.448.783,68	407.956.262,28	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yg dipelihara dan di bayar Pajaknya	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	35.700.930,00	Unit	35.898.631,21	Unit	36.704.665,09	Unit	37.550.785,06	Unit	38.438.603,62	Unit	39.369.828,73	187.962.513,71	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor	15.499.929,00	Unit	15.585.763,03	Unit	15.935.711,00	Unit	16.303.062,76	Unit	16.688.518,39	Unit	17.092.819,43	81.605.874,61	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	78.818.575,00	Laporan	79.255.049,00	Laporan	81.034.566,84	Laporan	82.902.584,57	Laporan	84.862.662,18	Laporan	86.918.570,42	414.973.433,01	KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat M	5.000.000,00	Laporan	5.027.688,52	Laporan	5.140.575,48	Laporan	5.259.076,59	Laporan	5.383.417,69	Laporan	5.513.837,98	26.324.596,26	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komuni	70.175.000,00	Laporan	70.563.608,43	Laporan	72.147.976,90	Laporan	73.811.139,97	Laporan	75.556.267,27	Laporan	77.386.716,00	369.465.708,58	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayan	3.643.575,00	Laporan	3.663.752,04	Laporan	3.746.014,46	Laporan	3.832.368,00	Laporan	3.922.977,22	Laporan	4.018.016,44	19.183.128,17	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	153.848.059,00	dokume n	154.700.024,13	dokume n	158.173.512,03	dokume n	161.819.745,17	dokume n	165.645.672,47	dokume n	169.658.654,07	809.997.607,86	KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangka	131.299.770,00	dokume n	132.020.836,13	dokume n	134.985.107,01	dokume n	138.096.798,51	dokume n	141.361.840,79	dokume n	144.786.515,02	691.251.097,47	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	22.554.289,00	dokume n	22.679.187,99	dokume n	23.188.405,01	dokume n	23.722.946,67	dokume n	24.283.831,68	dokume n	24.872.139,04	118.746.510,39	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN dan PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana kebakaran serta Non Kebakaran	Responsef Time Rate (Tingkat Waktu Tanggapi) Penanganan Kebakaran	304.095.878,00	dokume n	305.779.871,19	dokume n	312.645.562,96	dokume n	319.852.702,77	dokume n	327.415.025,79	dokume n	335.347.080,13	1.601.040.242,83	PROGRAM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan kebakran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	304.095.878,00	dokume n	305.779.871,19	dokume n	312.645.562,96	dokume n	319.852.702,77	dokume n	327.415.025,79	dokume n	335.347.080,13	1.601.040.242,83	KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan kebakran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	180.716.942,00	dokume n	181.717.699,07	dokume n	185.797.816,26	dokume n	190.080.847,90	dokume n	194.574.956,47	dokume n	199.288.787,56	951.460.107,27	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan kebakran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan kebakran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	26.663.400,00	dokume n	26.811.054,04	dokume n	27.413.044,06	dokume n	28.044.972,56	dokume n	28.708.043,84	dokume n	29.403.533,50	140.380.648,01	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Komitran dalam Pencegahan, Penangulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Komitran dalam Pencegahan, Penangulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/kota dalam Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	96.715.536,00	dokume n	97.251.118,08	dokume n	99.434.702,63	dokume n	101.726.882,30	dokume n	104.132.025,47	dokume n	106.654.759,06	509.199.487,55	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					123.378.936,00		124.062.172,12		126.847.746,69		129.771.854,86		132.840.969,32		136.098.292,57	649.580.135,56		

		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	6.962.403.420,00		7.000.959.154,50		7.158.152.064,02		7.323.162.570,59		7.496.305.146,62		7.677.912.877,12	36.656.491.812,85	PROGRAM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman Ketertiban Umum Masyarakat kab/kota	6.808.842.420,00	dokume n	6.846.547.779,02		7.000.273.681,69		7.161.644.758,47		7.330.968.545,85		7.508.570.782,41	35.848.005.547,44	KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3.133.874.320,00	dokume n	3.151.228.790,71		3.221.983.498,92		3.296.257.015,97		3.374.190.890,23		3.455.935.047,90	16.499.595.243,73	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					3.287.435.320,00		3.305.640.166,19		3.379.861.881,26		3.457.774.828,09		3.539.527.491,00		3.625.277.142,61			
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.923.880,00	dokume n	36.122.815,84		36.933.883,35		37.785.287,28		38.678.650,21		39.615.690,76	189.136.327,45	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	25.261.900,00	dokume n	25.401.792,94		25.972.140,76		26.570.853,39		27.199.071,87		27.858.004,72	133.001.863,68	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	31.239.000,00	dokume n	31.411.992,36		32.117.287,50		32.857.658,73		33.634.517,04		34.449.356,91	164.470.812,54	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	295.108.000,00	Laporan	296.742.220,97		303.404.989,90		310.399.115,01		317.737.925,51		325.435.539,52	1.553.719.790,90	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terselenggaranya Penegakan Perda	Persentase Jumlah penurunan pelanggaran peraturan daerah	153.561.000,00	persenta se	154.411.375,48		157.878.382,33		161.517.812,12		165.336.600,77		169.342.094,70	808.486.265,40	KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	32.800.000,00	Laporan	32.981.636,72		33.722.175,17		34.499.542,45		35.315.220,04		36.170.777,13	172.689.351,50	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.566.800,00	dokume n	13.641.928,93		13.948.231,89		14.269.768,06		14.607.150,22		14.961.027,41	71.428.106,52	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	46.644.500,00	Laporan	46.902.803,47		47.955.914,62		49.061.399,62		50.221.365,28		51.438.043,10	245.579.526,09	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	23.774.300,00	Laporan	23.905.955,05		24.442.716,74		25.006.172,93		25.597.397,44		26.217.527,64	125.169.769,80	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	36.775.400,00	Laporan	36.979.051,31		37.809.343,92		38.680.929,06		39.595.467,78		40.554.719,42	193.619.511,50	SUB KEGIATAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					1.355.079.421.250,52		1.362.583.450.999,71		1.393.177.609.943,48		1.425.293.293.027,83		1.458.991.705.424,10		1.494.337.674.839,50			
					1.351.791.985.930,52		3.305.640.166,19		3.379.861.881,26		3.457.774.828,09		3.539.527.491,00		3.625.277.142,60			
					3.287.435.320,00		1.652.820.083,10											
					1.351.791.985.930,52		1.359.277.810.833,52		1.389.797.748.062,22		1.421.835.518.199,74		1.455.452.177.933,11		1.490.712.397.696,89			
					Tingkat pertumbuhan	1,98												

LAMPIRAN 4

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD								
KAB. GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025																					
Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2025																					
SKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1			
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	Rp	%
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								Rp16.262.819.598,20	Rp386.099.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.648.918.973,20	Rp12.036.799.958,87	Rp386.099.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.422.899.333,87	(Rp4.226.019.639,33)	(34.02)		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp16.262.819.598,20	Rp386.099.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.648.918.973,20	Rp12.036.799.958,87	Rp386.099.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.422.899.333,87	(Rp4.226.019.639,33)	(34.02)		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Rp16.262.819.598,20	Rp386.099.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.648.918.973,20	Rp12.036.799.958,87	Rp386.099.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.422.899.333,87	(Rp4.226.019.639,33)	(34.02)		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp13.824.002.310,20	Rp386.099.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.210.101.885,20	Rp8.057.735.980,87	Rp386.099.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.443.835.355,87	(Rp5.766.266.329,33)	(68.29)		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp194.232.095,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.232.095,00	Rp153.848.059,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.848.059,00	(Rp40.384.036,00)	(26.25)		
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	Rp169.016.470,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.016.470,00	Rp131.293.770,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.293.770,00	(Rp37.722.700,00)	(28.73)		
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	Rp25.215.625,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.215.625,00	Rp22.554.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.554.289,00	(Rp2.661.336,00)	(11.80)		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp12.064.972.868,20	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.064.972.868,20	Rp6.981.646.464,67	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.981.646.464,67	(Rp5.083.326.403,53)	(72.81)		
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp12.056.572.868,20	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.056.572.868,20	Rp6.973.246.464,67	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.973.246.464,67	(Rp5.083.326.403,53)	(72.90)		
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp0,00	0.00		
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp30.756.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.756.800,00	Rp16.450.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.450.900,00	(Rp14.305.900,00)	(86.96)		
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan,	Rp30.756.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.756.800,00	Rp16.450.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.450.900,00	(Rp14.305.900,00)	(86.96)		

Jumlah															Bertambah / (Berkurang)		T+1		
Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun					Setelah					
									Sebelum			Tahun		Setelah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%				
1	05	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Semua Kelurahan/Desa	Rp241.665.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.706.200,00	(Rp9.959.600,00)	(4.30)				
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN Asli Daerah (PAD)		Kab. Gunung Mas. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp176.894.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.894.400,00	Rp0,00	0.00				
1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)		Kab. Gunung Mas. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp64.771.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.771.400,00	Rp54.811.800,00	(18.17)				
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kab. Gunung Mas. Kurun, Tumbang Anjir	Rp873.184.055,00	Rp386.099.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.359.283.430,00	Rp466.579.164.60	(Rp506.604.890,40)	(59.41)			
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)		Kab. Gunung Mas. Kurun, Tumbang Anjir	Rp21.650.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.650.400,00	Rp0,00	0.00				
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)		Kab. Gunung Mas. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp263.160.510,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.160.510,00	Rp194.727.219.60	(Rp68.433.290,40)	(35.14)			
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)		Kab. Gunung Mas. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp22.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.200.000,00	Rp0,00	0.00				
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)		Kab. Gunung Mas. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.555.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.555.500,00	Rp0,00	0.00				
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Bagi Hasil (DBH)		Kab. Gunung Mas. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp22.286.045,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.286.045,00	Rp0,00	0.00				
1	05	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Bagi Hasil (DBH)		Kab. Gunung Mas. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp16.695.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.695.000,00	Rp10.017.000,00	(Rp6.678.000,00)	(66.67)			

Jumlah																				
Tahun																				
Setelah																				
Sebelum																				
Tahun																				
T-1																				
T+1																				
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Semua Kelurahan/Desa													
							Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa													
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp619.656.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp619.656.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.163.000,00	(Rp431.493.600,00)	(229,32)	
							Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa													
1	05	01	2.06	0010	Penalauasaan Anasp Dinamis pada SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp0,00	Rp386.099.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp386.099.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp386.099.375,00	Rp0,00	0.00	
							Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa													
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp78.818.575,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.818.575,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.818.575,00	Rp0,00	0.00	
							Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa													
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	
							Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa													
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp70.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.175.000,00	Rp0,00	0.00	
							Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa													
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp3.643.575,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.643.575,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.643.575,00	Rp0,00	0.00	
							Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir													
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp240.372.117,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.372.117,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.686.617,60	(Rp111.685.499,40)	(86,79)	
							Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa													
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp173.671.329,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.671.329,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.485.758,60	(Rp96.185.570,40)	(124,13)	
							Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir													
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp35.700.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.700.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.700.930,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp30.999.858,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.999.858,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.499.929,00	(Rp15.499.929,00)	(100,00)	

Jumlah										Bertambah / (Berkurang)								
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun					T+1					
								Sebelum			Setelah		Rp	%				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi			Belanja Modal	Belanja Transfer	Jumlah	
					Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa											
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa											
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa											
1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPrgional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa											
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa											
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota													

Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1			
									Tahun					Setelah										
									Sebelum															
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.800.000,00	Rp32.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.800.000,00	Rp0,00		0.00					
1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.897.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.897.400,00	Rp13.566.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.566.800,00	Rp0,00	(Rp20.330.600,00)	(149.86)					
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	..		Rp77.402.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.402.980,00	Rp46.644.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.644.500,00	Rp0,00	(Rp30.758.480,00)	(65.94)					
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.134.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.134.300,00	Rp23.774.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.774.300,00	Rp0,00	(Rp26.360.000,00)	(110.88)					
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.035.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.035.500,00	Rp36.775.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.775.400,00	Rp0,00	(Rp13.280.100,00)	(36.06)					
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				Rp338.613.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp338.613.598,00	Rp304.095.878,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp304.095.878,00	Rp0,00	(Rp34.517.720,00)	(11.35)					
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun				Rp338.613.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp338.613.598,00	Rp304.095.878,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp304.095.878,00	Rp0,00	(Rp34.517.720,00)	(11.35)					
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp180.716.942,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.716.942,00	Rp180.716.942,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.716.942,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00					
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp41.476.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.476.400,00	Rp26.663.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.663.400,00	Rp0,00	(Rp14.813.000,00)	(55.56)					

Jumlah																
Tahun										Bertambah / (Berkurang)						
Sebelum										Setelah						
T-1										T+1						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Jumlah	%
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp116.420.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.420.256,00	Rp96.715.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.715.536,00	(20,37)
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)																
(Rp)																
Kuala Kurun, Tanggal 23 April 2025																
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																
SALAMPAK HARIS, S. Sos., M.Ec.Dev																
NIP. 196808171989111002																
Mengesahkan,																
PPKD																
Hardeman, SE., M.Si																
NIP. 196604061994031009																
Rp12.422.899.333,87																
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																
No.	Nama		NIP		Jabatan		Tanda Tangan									
1.	RICHARD, S.T.		196909301995031003		Kepala TAPD											
2.	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev		197801192006041020		Sekretaris TAPD											
3.	HARDEMAN, S.E., M.Si		196604061994031009		Anggota TAPD											
4.	EDISON, S.E., M.Si		197501131969031004		Anggota TAPD											

*) Sesuai periodisasi SPD

LAMPIRAN 5

